

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.403429/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01
Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
- 3. Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
- 4. Kode/Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
- Sebesar : Rp. 53.385.000 (LIMA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 53.385.000
Rp. 53.385.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 53.385.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 53.385.000

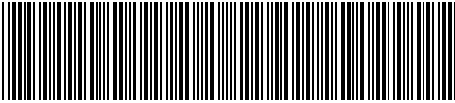
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8950-9833-0191-0284

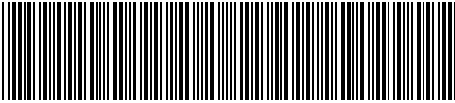
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				53.385.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara				53.385.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	-				
	:	2. 03	-				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan		2.480.000
Rincian Output	:	01 AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan		2.480.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara		405.000
Rincian Output	:	01 BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,00	Perkara		405.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang		33.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang		33.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara		17.500.000
Rincian Output	:	01 QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1,00	Perkara		17.500.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8950-9833-0191-0284

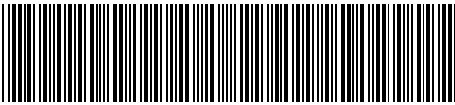
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	53.385.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	53.385.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



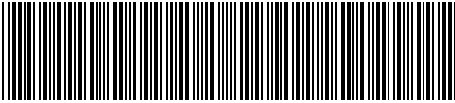
DS:8950-9833-0191-0284

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	-	53.385	-	-	-	53.385	30 . 51	
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	53.385	-	-	-	53.385		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	53.385	-	-	-	53.385		
1059.AEA	Koordinasi	-	2.480	-	-	-	2.480		
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	2.480	-	-	-	2.480		
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	405	-	-	-	405		
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	405	-	-	-	405		
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	33.000	-	-	-	33.000		
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000		
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	17.500	-	-	-	17.500	30 . 51	
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8950-9833-0191-0284

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Kewenangan : (KD)

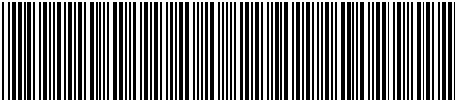
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	17.500	-	-	-	17.500	015@	
JUMLAH		-	53.385	-	-	-	53.385		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8950-9833-0191-0284

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

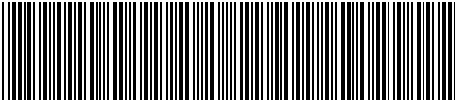
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	7.200	0	26.185	53.385
		BELANJA BARANG	0	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	7.200	0	26.185	53.385
		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	7.200	0	26.185	53.385
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	7.200	0	26.185	53.385
		PERKIRAAN PENERIMAAN	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	455	5.251
		- PNBP (425232)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	41	470
		- PNBP (425233)	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	123	1.410
		- PNBP (425239)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	291	3.371

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025
IV A. B L O K I R



DS:8950-9833-0191-0284

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

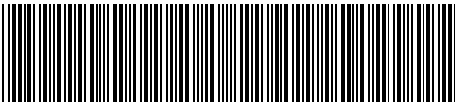
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 23.785 52 Belanja Barang Rp. 23.785		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.200 Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025
005.05.BF 1059	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1059.AEA	Koordinasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.080 Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180 Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 225 Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.800 Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300 Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8950-9833-0191-0284

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775